

Terbentuknya “Kelompok Mencari”: Dinamika Jaringan Perantara (*Brokerage*) dalam Pemekaran Daerah Papua Barat Daya

I Ngurah Suryawan

Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat
ngurahsuryawan@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menelusuri terbentuknya jaringan perantara (*brokerage*) yang telah tercipta jauh sebelum ramainya rencana pembentukan Provinsi Papua Barat Daya tahun 2022. Catatan lapangan saya menggambarkan bahwa kelompok jaringan perantara dalam pemekaran daerah atau usaha untuk mengakses keuntungan ekonomi politik tersebut disebut dengan “kelompok mencari”. Data utama artikel ini adalah wawancara mendalam sebanyak dua kali terhadap PTW, seorang tokoh sentral birokrat pemekaran Provinsi Papua Barat di Sorong pada Maret 2009. Argumen utama artikel ini adalah genealogi pemekaran daerah, khususnya di wilayah kepala burung (Sorong Raya) adalah konsumsi para elit local dan kelompok kelas menengah Papua. Mereka adalah kelompok-kelompok patron yang terdiri dari jaringan birokrat, pengusaha, dan kepala suku dan marga di wilayah Sorong Raya. Kelompok-kelompok ini membangun jaringan dan aliansi untuk pembentukan provinsi dan kabupaten baru, pembagian proyek-proyek pembangunan, dan pengisian jabatan-jabatan birokrasi di rencana wilayah pemekaran baru. Keseluruhan tingkah polah jaringan perantara (*brokerage*) tersebut melandasi dasar awal rencana pemekaran wilayah baru dan program-program pembangunan yang selanjutnya berlangsung. Artikel ini berargumentasi bahwa jeratan kepentingan jaringan perantara (*brokerage*) ini mewarnai pelaksanaan pemerintahan di wilayah baru dan juga rencana pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Jaringan “kelompok mencari” ini membentuk jaringan kelas menengah baru yang menciptakan dan mengkonsolidasikan kekuasaannya untuk mengontrol sumber daya ekonomi dan politik yang disediakan negara kepada Papua.

Kata kunci: “kelompok mencari”, dinamika, jaringan perantara, *brokerage*, pemekaran daerah

Pendahuluan

Seorang tokoh muda salah satu suku di pedalaman kepala burung Papua Barat, sebut saja namanya Hermanus, yang mengenyam pendidikan tingkat sarjana di Kota Jayapura Papua, mengungkapkan kekhawatirannya melihat para elit kampung dan adat di kampungnya yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada masyarakatnya. Para elit kampung sibuk membicarakan kapan pemekaran kampung—yang merupakan janji bupati baru—akan terlaksana. Pada sisi lain, dana-dana kampung yang masuk terus dipergunjingkan untuk membangun perumahan-perumahan sebagai bakal rencana kampung baru. Perbincangan di tengah masyarakat pada akhirnya mengarah siapa yang akan tetap di kampung lama dan yang memutuskan pindah menuju kampung baru.

Tidak hanya para elit kampung, kepemimpinan adat terpecah dalam beberapa kelompok-kelompok dengan berbagai kepentingannya. Terjadi penurunan wibawa dan pengaruh pemimpin adat di kampung. Tidak ada tokoh adat yang mampu mempersatukan berbagai kelompok marga-marga dengan kepentingannya masing-masing. Dampaknya adalah antara masyarakat ada saling curiga dan tidak percaya satu dengan yang lain. Ini situasi yang berbahaya untuk persatuan masyarakat di kampung. Ia dengan berapi-api menceritakan kejadian tersebut kepada saya pada sebuah kesempatan di Kota Manokwari, Papua Barat pada pertengahan tahun 2017.

Saya pertama-tama akan menggambarkan kompleksitas administratif dari cara negara ini (Indonesia) menangani Papua. Pemecahan provinsi dan kabupaten-kabupaten baru bukan hanya urusan di atas kertas, tetapi juga menyangkut banyak hal. Inilah peluang yang paling nyata dalam pikiran para elit Papua untuk membentuk kekuasaannya. Daerah baru berarti menawarkan jabatan, uang, dan kekuasaan sesungguhnya di tingkat lokal. Saya akan mencoba menelusuri kronologis tersebut untuk memberikan gambaran sangat rapuhnya rasa saling percaya antara “orang pusat” di Jakarta dengan kaki tangan mereka yaitu para elit lokal di Papua. Pada sisi yang lain, kita melihat jargon dan cita-cita pemekaran daerah—rentang kendali pemerintahan, mendekatkan pelayanan publik dan kesejahteraan—bertentangan dengan realitas yang terjadi di tengah masyarakat.

Bagian kedua saya akan memberikan konteks bertabrakannya orientasi-orientasi Papua, yaitu totalitas kosmologi, pengetahuan, budaya, dan relasi-relasi rakyat Papua dengan lingkungan, leluhur, dan ritual-ritual yang terekspresi, dengan logika kemajuan dan modernitas yang dibawa oleh pembangunan, Otonomi Khusus (Otsus), dan pemekaran. Tabrakan ini berimplikasi serius berkaitan dengan respon rakyat Papua serta posisi dan dinamika mereka menghadapi transformasi sosial yang terus bergerak kencang.

Pada bagian selanjutnya saya menggambarkan jaringan perantara (*brokerage*) yang terjadi sesungguhnya di tingkat lokal. Saya akan memperdalam bagaimana proses terbentuknya jaringan perantara ini, peranan birokrat di dalamnya, konflik yang muncul, dan bagaimana usahanya untuk membangun jaringan dan membangun generasi baru. Saya fokus memperhatikan wilayah kepala burung di Papua Barat yang kini rencananya akan dimekarkan menjadi Provinsi Papua Barat Daya. Para elite di Kota Sorong sudah sejak awal tahun 2000-an menginginkan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya setelah kekecewaan tidak menjadi ibukota dari Provinsi Papua Barat.

Saya berhasil mewawancarai PTW, salah satu tokoh penting yang selalu “berjuang” mendirikan Provinsi Papua Barat Daya dengan ibukotanya di Kota Sorong. Ia membangun kelompok birokrat muda dan memekarkan wilayah-wilayah baru yaitu: Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat. Wilayah kepala burung ini sering disebut dengan “Sorong Raya” ditambah dengan Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat. Wilayah-wilayah inilah dalam mimpi PTW dan para didikan birokratnya menjadi Provinsi Papua Barat Daya. Sayangnya mimpi PTW untuk menyaksikan lahirnya Provinsi Papua Barat Daya yang ia idam-idamkan kandas. Ia meninggal pada 18 Maret 2019.

Keseluruhan fragmen etnografi yang saya uraikan berargumen bahwa lahirnya daerah-daerah pemekaran baru di Tanah Papua, baik itu provinsi, kabupaten, distrik, dan kampung-kampung akan melahirkan munculnya sekelompok elit dari berbagai latar belakang—dari mulai birokrat, pemuda pengangguran, preman lokal, hingga tokoh adat—yang berlapis-lapis dan sangat kental ciri khas masing-masing daerahnya. Semangat pemekaran di wilayah “Sorong Raya” sebagai Provinsi Papua Barat Daya kembali bergairah setelah disetujuinya tiga provinsi pemekaran baru di Provinsi Papua.

Saya menggunakan konsep jaringan untuk menerangkan terbentuknya jaringan perantara (*brokerage*) yang lahir dari proses pemekaran daerah. Jaringan perantara tersebut saya fokuskan di birokrasi pemerintahan sebagai pendorong utama dari pemekaran karena menjadi perpanjangan tangan negara di daerah. Saya mendalami usaha-usaha dari jaringan perantara birokrat ini untuk mempersiapkan manuver-manuver politik dalam usaha pemekaran daerah.

Saya bertitik tolak dari gagasan yang mengungkapkan masyarakat terdiri dari kekuasaan berupa jaringan sosial-ruang yang berhimpitan dan bersilangan. Perangkat teknologi untuk memobilisasi sumber daya dari jauh sudah ada pada pada akhir tahun 1940-an—radio, surat kabar, telepon, pesawat terbang dan akhirnya, kekuatan militer. Semua ini dapat membantu pemerintah pusat untuk memproyeksikan kehendaknya ke daerah tanpa terlalu khawatir ada gangguan di tengah jalan. Jauh lebih penting adalah manusia *broker* (perantara) yang mampu secara pribadi menghubungkan satu sama lain jaringan-jaringan sosial yang terpisah-pisah dari sisi geografi di seluruh kepulauan ini.

Jaringan perantara dari kelompok masyarakat urban inilah yang memegang peranan penting dan berpengaruh di tengah masyarakat. Mereka ini seperti aktivis, intelektual, polisi, militer, birokrat-politisi, guru, pengusaha, pemimpin gereja, dan kelompok masyarakat urban lainnya. Mereka memiliki status sosial dan modal sosial yang tinggi dan memiliki kemampuan sebagai penghubung dua kelompok yang memiliki kepentingan berbeda.

Broker (perantara) menciptakan hubungan terarah antara dua pihak yang sama sekali tidak punya hubungan satu sama lain. Terdapat lima tipe perantara yaitu: *pertama*, *coordinator* (koordinator) dimana ketiga pihak adalah anggota dari kelompok yang sama, *internal brokerage* (perantara internal). *Kedua*, *itinerant* (perantara lepas) adalah perantara dari luar, kedua pihak utama adalah anggota adalah anggota dari kelompok yang sama—misalnya pialang saham). *Ketiga*, *gatekeeper* (broker adalah anggota dari kelompok yang didekati oleh kelompok pesaing—misalnya editor majalah. *Keempat*, *representative* (perwakilan) adalah perantara adalah anggota dari kelompok yang sedang melakukan pendekatan pada kelompok saingan. *Kelima*, *liaison* (penghubung) yaitu perantara yang berasal dari luar kedua kelompok yang bersaing.¹

Artikel ini menelusuri jaringan perantara (*brokerage*) elit Papua ruang-ruang sosial dan peran para elit di beberapa wilayah Papua Barat. Pembicaraan sehari-hari di *para-para* (tempat berkumpul) kampung, gossip, jaringan kepentingan proyek pembangunan di kampung, adat yang rapuh, konflik program bantuan perusahaan, hingga perjuangan menuju pemekaran wilayah tergambar melalui fragmen-fragmen etnografi artikel ini. Saya mendasarkan keyakinan untuk mendalami usaha lebih banyak dengan jaringan, tidak lagi hanya sebagai metafora, tetapi juga sebagai peta kompleks tentang

¹ Klinken, Gerry van, *The making of middle Indonesia: kelas menengah di Kota Kupang, 1930-an –1980-an*. Jakarta: Yayasan Obor, 2015.

hubungan yang sebenarnya 20.² Orang-orang yang tergambarkan dalam artikel ini memainkan peranan mediasi dan perantara tersebut.

“Cakar-Cakar” Pemekaran Papua Kontemporer

Pemekaran daerah di Tanah Papua memasuki episode baru. Tanah Papua akan memiliki tiga provinsi baru yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Daerah kepala burung akan bertambah satu provinsi baru yaitu Papua Barat Daya. Cikal bakalnya adalah revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Revisi tersebut dilakukan juga tidak berkonsultasi dengan rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

Salah satu poin krusial dalam revisi UU Nomor 2 Tahun 2021 tersebut adalah bahwa pemekaran daerah bisa dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada pasal 76 ayat (2) UU Otsus baru menegaskan “Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua.”

Sejurus kemudian, muncullah Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pemekaran wilayah di Papua yaitu pembentukan Provinsi Papua Selatan, pembentukan Provinsi Papua Tengah dan pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Lahirnya ketiga RUU adalah inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang melangsungkan rapat paripurnanya pada 12 April 2022 lalu. Tidak berlangsung lama, pengesahan RUU menjadi UU atas tiga daerah pemekaran di Provinsi Papua yaitu, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan dilakukan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 30 Juni 2022. Tidak berselang lama, DPR RI kemudian menggenjot Kembali RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan disahkan pada 7 Juli 2022.

Penolakan pemekaran daerah baru tersebut berlangsung di berbagai wilayah Tanah Papua hingga mengorbankan nyawa. Bentrokan antara rakyat Papua yang menolak pemekaran dengan aparat keamanan terjadi di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo pada 15 Maret 2022. Dua rakyat Papua, Yakob Meklok dan Eson Weipsa tertembak dalam bentrokan tersebut. Kedua jenazah korban kemudian dimakamkan pada 16 Maret 2022 di pinggir jalan tepatnya di Jalan Gunung dekat dengan Kali Bonto, Kampung Tomon Satu, Distrik Dekai Kota, Kabupaten Yahukimo. Keputusan pemakaman yang dilakukakan di pinggir jalan adalah bentuk perlawanan terhadap pemaksaan Otsus Papua Jilid 2 dan pemekaran daerah yang dilakukan oleh Jakarta di Tanah Papua.

² Ibid, 37



Kepala Suku Meek, Mathias Suu (kemeja batik hitam cokelat) bersama Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengikuti proses pemakaman Yakob Meklok dan Eson Weipsa, yang berlangsung di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, pada Rabu (16/3/2022). - Dok. Mathias Suu/Tabloid Jubi

Pengamatan penulis, demonstrasi penolakan pemekaran di Jayapura sepanjang Maret - April 2022 mengungkapkan kegagalan Otsus Jilid Pertama yang dianggap belum berhasil mengangkat harkat dan martabat rakyat Papua. Rakyat Papua belum merasa menjadi tuan di negerinya sendiri. Demikian juga Otsus Jilid Kedua dan pemekaran daerah sama sekali tidak melibatkan rakyat Papua dalam proses negosiasinya. Otsus dan pemekaran daerah justru dianggap menjadi pintu pembuka masuknya investasi yang merampas tanah-tanah ulayat masyarakat adat yang beralih ke pemodal dan jaringan investasi.

Provinsi Papua Barat Daya dari tahun 2007 sudah didengung-dengungkan dan kemudian dideklarasikan pada 15 Januari 2007. Sebelumnya juga terjadi deklarasi pendirian Provinsi Papua Selatan pada 12 Januari 2007. Khusus untuk Provinsi Papua Barat Daya ini mengkalim Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Teluk Bintuni sebagai bagian dari wilayahnya. Sementara itu Papua Selatan direncanakan meliputi 4 wilayah yakni Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat. Sedangkan Irian Jaya Tengah direncanakan berpusat di Nabire, dengan cakupan wilayah-wilayah di perairan Teluk Cendrawasih yang meliputi Kabupaten Biak, Kabupaten Serui, Kabupaten Nabire, Kabupaten Yapen Waropen, dan Kabupaten Supiori.

Di wilayah Papua Barat, teridentifikasi hirarki diversitas budaya yaitu di wilayah Manokwari sebagai ibukota provinsi Papua Barat dengan mayoritas Suku Arfak (Hattam, Sough, Moile, Meiyakh). Selanjutnya di Sorong dengan Suku Ayamaru dan wilayah Kaimana dan Fakfak, Bintuni, Teluk Wondama, Raja Ampat sebagai kabupaten-kabupaten kecil dengan kelompok sukunya. Dalam diversitas ini, bisa dipetakan hirarki yang ada adalah rencana pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dengan wilayah Sorong dan provinsi induk yaitu Provinsi Papua Barat dengan wilayah

Manokwari dan kabupaten-kabupaten sekitarnya. Wilayah lainnya adalah daerah-daerah dengan ciri khas keberbedaan agama yaitu Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana. Oleh karena itu, bisa dipetakan 3 kelompok hirarki dalam heterogenitas social budaya di wilayah Papua Barat.³⁴

Kabupaten Sorong dan Kota Sorong menjadi simbol modernisasi dan perdagangan di wilayah kepala burung yang melebihi modernitas yang terjadi di Kabupaten Manokwari yang identitas dengan “kota injil” dan masuknya peradaban di Pulau Mansinam 1855. Manokwari kemudian menjadi kota pemerintahan kabupaten dan provinsi Papua Barat, sementara Fakfak, Kaimana, dan Raja Ampat menjadi sebaran wilayah dimana sebagian penduduknya adalah “muslim-Papua” di tengah mayoritas agama Kristen Protestan dan Katolik.⁵ Sebaran wilayah di kepala burung yang heterogen itulah yang akan “dibagi-bagi” dalam administrasi pemerintahan melalui pemekaran daerah.

Logika pemekaran daerah yang jamak diperbincangkan adalah memperpendek rentang kendali pemerintahan, pelayanan public, dan “mendekatkan” kesejahteraan kepada rakyat Papua. Massifnya pembangunan (di) Papua dan ide-ide memperpendek rentang kendali pemerintahan terasa janggal dengan realitas yang terjadi di lapangan. Studi yang dilakukan oleh Dale dan Djonga dengan kasus di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, secara gamblang menunjukkan terdapat pola ketidakadilan dan peminggiran (marginalisasi) mengikuti irisan ras, dimana mayoritas masyarakat pribumi Papua—sering disebut dengan Orang Asli Papua (OAP)—berada di pinggiran dalam pola sentral-periferi atau berada di bawah dalam pola piramida.⁶ Proses dan hasil pembangunan diakses secara lebih besar oleh para migran atau penduduk non-Papua yang jumlahnya melampaui jumlah penduduk asli di Kabupaten Keerom akibat program transmigrasi pemerintah dan smigrasi spontan. Dinamika inilah yang disebut dengan *migrant capture mechanism* dimana akses terhadap proses dan manfaat pembangunan justru ditangkap dan dikuasai oleh migran non-Papua, sementara orang Papua, terutama yang berada di pinggiran dan di pedalaman tidak ikut menikmati pembangunan yang ada.

Mayoritas OAP yang berada di pedalaman-pedalaman tidak mendapatkan keadilan dalam bentuk pelayanan public (terutama pendidikan dan Kesehatan), pembangunan ekonomi, dan partisipasi dalam pemerintahan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kegagalan negara dalam upaya mendorong dan memajukan masyarakat pribumi Papua, baik dalam upaya mempromosikan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, dan partisipasi yang aktif dalam pelaksanaan pemerintahan.

³ Cahyo Pamungkas, Konflik Elit Lokal dalam Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indonesia, JilidXXX. NO. 1. 2004

⁴ I Ngurah Suryawan, “Desain Besar Penataan Daerah dan Dinamika Identitas Budaya di Provinsi Papua Barat.” *Kritis, Jurnal*

Studi Pembangunan Interdisiplin, 23(3), 1-18, 2014

⁵ Ibid

⁶ Cypri J P Dale dan John Djonga, “Paradoks Papua : pola-pola ketidakadilan sosial, pelanggaran hak atas pembangunan dan kegagalan kebijakan afirmatif, dengan fokus di Kabupaten Keerom”, Jayapura : Forum Kerjasama LSM Papua : Yayasan Teratai Hati Papua : Sunspirit for Justice and Peace, 2011, P.77-78

Pembangunan infrastruktur yang bertujuan menyambungkan (konektivitas) daerah-daerah pedalaman juga penuh dengan *problematic*. Studi yang dilakukan oleh The Asia Foundation dan LIPI secara khusus memperhatikan bagaimana dampak infrastruktur, khususnya jalan, pada Orang Asli Papua (OAP).⁷ Mencermati pada aras permukaan memang berdampak dengan terbukanya akses yang lebih besar kepada OAP untuk ke pasar, peningkatan mobilitas social, akses terhadap barang dan peluang ekonomi. Selain persoalan akses tersebut, yang tidak terhindarkan adalah infrastruktur, dalam hal ini jalan, juga memfasilitasi akses penggunaan hutan, kerusakan daya dukung alam, dan memperbesar ketimpangan dan konflik antara OAP dengan kelompok pendatang. Kerentanan terhadap mata pencaharian, tradisi, dan budaya OAP menjadi semakin menganga karena kehadiran pembangunan infrastruktur.⁸

Tabrakan Orientasi Papua versus Pembangunan

Pembangunan dan kemajuan menyingkirkan orientasi-orientasi orang Papua yang berkaitan dengan relasinya dengan tanah, ingatan, berbagi cerita, perjalanan, agama, keterlibatan dengan entitas non-manusia, dan pertemuan dengan negara dan marginalisasi. Perspektif ini melihat bahwa untuk masa depan Papua dan rekonsiliasi konflik di Papua, orang perlu mengakui orientasi-orientasi tersebut meskipun mungkin tampak keluar dari kerangka waktu modernisasi yang biasa.⁹

Orientasi-orientasi orang Papua seringkali menantang kepengaturan yang dilakukan oleh negara. Mengikuti argumen Scott tentang ‘seni untuk tidak diperintah’ (*the art of not being governed*), orientasi-orientasi orang Papua tersebut menjelajah jauh menembus modernitas dan kemajuan.¹⁰ Orang-orang Papua, seperti argumen Scott telah mempertahankan praktik budaya tertentu untuk mencegah negara membatasi kebebasan mereka.¹¹ Negara telah berusaha untuk mengintegrasikan masyarakat Zomia, sebuah kawasan dataran tinggi di Asia Tenggara, untuk mendapatkan akses ke tanah dan sumber daya mereka, dan untuk dikenakan pajak¹²

Tidak hanya di Papua, kawasan pasifik secara umum menggambarkan mobilitas sekaligus juga keberterbatasan komunitas untuk “memerintah dirinya sendiri”. Wiessner dan Tumu misalnya

⁷ “JALAN UNTUK KOMUNITAS: MEMBANGUN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS JALAN UNTUK PENGHIDUPAN ORANG ASLI PAPUA DAN LINGKUNGAN HIDUP” (The Asia Foundation dan LIPI, 2019), <https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/10/Ringkasan-Eksekutif-Rapid-Assessment-Infra-Papua.pdf>.

⁸ I Ngurah Suryawan dan Muhammad Azka Fahriza, "Berhala-Berhala Infrastruktur : Potret Dan Paradigma Pembangunan Papua Di Masa Otsus", Jakarta: Elsam, 2020.

⁹ Jaap Timmer, “Batas-Batas Konsep Kemajuan dalam Papua Road Map” dalam Riwanto Tirtosudarmo dan Cahyo Pamungkas (editor), Emansipasi Papua: Tulisan Para Sahabat untuk Mengenang dan Menghormati Muridan S. Widjojo (1967-2014). Jakarta: Imparsial bekerjasama dengan Kampung Limasan Tonjong, Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD), Parahyangan Centre for Democracy and Peace Studies (Pacedepes) dan Yayasan TIFA, 2021

¹⁰ James Scott, *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*. New Haven and London: Yale University Press, 2009

¹¹ Ibid

¹² Jaap Timmer, “Batas-Batas Konsep Kemajuan dalam Papua Road Map” dalam Riwanto Tirtosudarmo dan Cahyo Pamungkas (editor), Emansipasi Papua: Tulisan Para Sahabat untuk Mengenang dan Menghormati Muridan S. Widjojo (1967-2014). Jakarta: Imparsial bekerjasama dengan Kampung Limasan Tonjong, Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD), Parahyangan Centre for Democracy and Peace Studies (Pacedepes) dan Yayasan TIFA, 2021

menunjukkan bagaimana orang Enga di daerah pedalaman Papua New Guinea terlibat aktif di kawasan dengan keanekaragaman budaya yang tinggi, Temuan ini tentu saja membantah klaim terisolir secara geografis bagi masyarakat di daerah pedalaman.¹³ Bahkan dalam studi klasik yang dilakukan oleh Gordon dan Meggit, komunitas di pedalaman Papua New Guinea sudah mulai untuk mengkonstruksikan hukum dan keteraturan yang mereka pikirkan, meski tentu saja tantangan dari kekuasaan tidak akan pernah berhenti mengintai dan mencampuri.¹⁴

Studi yang dilakukan Haenen (1988) dan Timmer (2011) di kawasan kepala burung Papua dengan tegas menyebutkan komunitasnya secara terus-menerus bergerak.¹⁵ Oleh sebab itulah mereka menyebutkan komunitas di kawasan kepala burung Papua dengan *peoples on the move*. Kawasan ini sangat dipengaruhi oleh dinamika migrasi dan mobilitas yang cepat diantara komunitas. Peranan penting dari kain timur sebagai benda utama dalam pertukaran perkawinan, kompensasi, dan persembahan kepada roh-roh leluhur menjadi sangat sentral.¹⁶

Orientasi-orientasi orang Papua tersebut jika mengikuti argumen dari Dhakidae dalam menjelaskan komunitas yang memiliki kosmologi sendiri dalam memerintah dirinya disebut dengan *native power structure*.¹⁷ Kekuasaan berpijak atas sesuatu yang sungguh-sungguh mondial, terrestrial, yaitu tanah yang sama sekali bukan dalam bentuk abstrak seperti “tanah air”. Sistem kekuasaan itu atas pijakan yang kongkrit yaitu bahwa kekuasaan itu kongkret dan berurusan dengan kehidupan kongkret, yaitu apa saja yang bisa ditanam di atasnya untuk menghidupkan daging dan darah. *Native power structure* ini harus berhadapan dengan orang-orang yang menjadi instrumen negara dan kekuasaannya yang secara makro nasional tidak memegang kekuasaan. Sementara kosmologi komunitas lokal dengan kekuasaannya yang kongkrit tersebut terus tumbuh dan berkembang.

Salah satu ideologi raksasa yang mengatur orang Papua adalah pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang menjamah wilayah-wilayah Papua di segala penjuru, jelas memerlukan tanah untuk mendirikan infrastruktur fisik. Selain itu, wujud pembangunan lainnya adalah kebutuhan sumber daya manusia untuk menggerakkan birokrasi dan perusahaan. Pemekaran daerah hadir silih berganti dan memunculkan kelompok-kelompok elit Papua baru. Hadirnya pembangunan tentu membawa kesadaran dan pemahaman baru ke dalam masyarakat local. Bertemunya ide baru pembangunan dengan kehidupan masyarakat lokal mendatangkan berbagai implikasi. Cara pandang program pembangunan terhadap masyarakat bertemu dengan cara pandang masyarakat melihat pembangunan.

¹³ Polly Wiessner, Akii Tumu, and Nitze Pupu, *Historical Vines : Enga Networks of Exchange, Ritual, and Warfare in Papua New Guinea* (Bathurst, N.S.W.: Crawford House Pub, 1998).

¹⁴ Robert J Gordon and Mervyn J Meggitt, *Law and Order in the New Guinea Highlands : Encounters with Enga* (Hanover: Published For University Of Vermont By University Press Of New England, 1985).

¹⁵ PAUL HAENEN, “MARRIAGE ALLIANCE among the MOI of IRIAN JAYA (INDONESIA),” *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 144, no. 4 (1988): 464–77, <https://www.jstor.org/stable/27863979>

¹⁶ Jaap Timmer, “Cloths of Civilisation:Kain Timurin the Bird’s Head of West Papua,” *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 12, no. 4 (August 2011): 383–401, <https://doi.org/10.1080/14442213.2011.587020>.

¹⁷ Daniel Dhakidae, “Epilog: Professor Doktor Cornelis Lay dan Jalan Ketiga Cendekiawan” dalam Pratikno *et al. Intelektual Jalan Ketiga: Pemikiran Cornelis Lay tentang Demokrasi, Desentralisasi, Nasionalisme, dan Reformasi Keamanan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

Jika kita menelisik lebih dalam, perspektif pembangunan yang ditanamkan oleh rezim Orde Baru adalah sebagai perubahan yang dikehendaki dan dibutuhkan, sehingga apa saja yang dianggap kuno dan tidak mengalami perubahan dengan sendirinya dianggap sebagai “keterbelakangan”. Hal yang dianggap terbelakang—dan menjadi salah satu yang terpenting—adalah kebudayaan sebagai sebuah totalitas laku hidup dan nilai-nilai komunitas local yang dipandang sebagai penghambat laju pembangunan.¹⁸

Konsekuensi dari pembangunan dan kemajuan ini adalah orang Papua mencoba mengakses modernitas dengan merujuk ke bagian barat (Jakarta) dan bukannya ke Pasifik yang lebih dekat. Orang-orang Papua meski terisolir sekalipun merindukan akses moderitas yang berwujud pendidikan yang berorientasi ke Indonesia. Mencermati argumen yang diungkapkan oleh Munro, generasi muda Papua yang memperoleh pendidikan di Indonesia bahkan di luar negeri berperan sebagai perantara (*broker*) antara masyarakat Papua na dan masyarakat Indonesia pada umumnya.¹⁹ Hal ini disebabkan karena meskipun para anak muda Papua berpendidikan tinggi, mereka ditantang untuk berhasil menemukan cara untuk menggunakan keterampilan mereka guna mendukung impian-impian yang melebihi sekedar pengakuan. Oleh sebab itulah masih tetap dinantikan impian-impian jangka panjang apa yang akan dipicu oleh para lulusan tersebut.

Cikal Bakal Jaringan Perantara



Dua wajah elit Papua yang terus bertransformasi seiring dengan Otonomi Khusus (Otsus) dan pemekaran daerah yang berlangsung massif di Tanah Papua - Dok. <http://prismaindonesia.com> (ilustrasi tulisan Amirudin al-Rahab, Munculnya Elit (Baru) Papua, 10 Januari 2015.

¹⁸ I Ngurah Suryawan dan Muhammad Azka Fahriza, "Berhala-Berhala Infrastruktur : Potret Dan Paradigma Pembangunan Papua Di Masa Otsus", Jakarta: Elsam, 2020.

¹⁹ Jenny Munro, *Dreams made small : humiliation and education in a Dani modernity*, The Australian National University, 2009

Almarhum PTW pertama kali saya temui di sebuah kantor pemerintahan di Kota Sorong, Papua Barat. Ia adalah salah satu tokoh penting dalam pemekaran Provinsi Papua Barat yang kemudian tersedang dalam perebutan posisi jabatan sebagai gubernur. Hal itu sangat terasa sekali. Saat saya mewawancarainya, ia selalu menyesalkan ibukota ditempatkan di Manokwari, bukannya di Sorong. Cita-citanya adalah terus untuk memekarkan wilayah-wilayah di Sorong raya sehingga menjadi wilayah-wilayah terpisah sesuai dengan budaya mereka masing-masing. Ia beranggapan bahwa wilayah Papua masih luas sehingga masih bisa dimekarkan menjadi kampung, distrik, kabupaten, maupun provinsi baru lagi.

Seluruh Sorong Raya sebaiknya mempunyai kabupaten sendiri-sendiri biar cepatnya pembangunan berjalan. Total keseluruhan suku yang berada di Sorong Raya berjumlah 32 suku ditambah dengan suku nusantara yang berada hamper di semua wilayah kepala burung ini. PTW mengungkapkan pendapatnya dengan menggebu-gebu:

Perbedaan suku itu juga harus perbedaan wilayah administrasi. Dipecah saja masing-masing suku agar terorganisir dengan baik. Homogen dan kepentingan mereka juga jadi terurus dengan baik jika seragam.

PTW yang memiliki dasar sebagai seorang birokrat, menaruh perhatian yang besar terhadap berjalannya birokrasi di masing-masing wilayah pemekaran. Oleh sebab itulah, ia sangat memperhatikan bagaimana pegawai birokrasi menjadi cermin dari wilayah-wilayah pemekaran yang ia rencanakan.

Perekrutan pegawai birokrasi di masing-masing wilayah pemekaran harus mencerminkan suku-suku yang berada di wilayah Sorong Raya jika berkeinginan untuk pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi ini harus mendapatkan dukungan dari seluruh suku yang berada di Sorong Raya sehingga menjadi kuat birokrasi dan pemerintahannya. Para pegawainya juga harus kuat dan berasal dari wilayah tempat mereka lahir sehingga kepentingan mereka akan merasa dipenuhi.

PTW beranggapan bahwa kelompok-kelompok etnik yang ada di Papua harus mendapatkan haknya untuk mendapatkan kabupaten ataupun provinsi sendiri sesuai dengan aspirasi mereka. Para pendatang yang datang ke Papua itu jumlahnya banyak yang berada di Sorong sehingga kota ini menjadi berkembang, maju, dan berubah. Bagi PTW, kelompok pendatang ini belum diorganisir dengan baik dan memberikan keuntungan bagi kelompok-kelompok suku yang berada di Sorong. Yang justru terjadi adalah para pendatang ini yang menyingkirkan suku-suku yang berada di Sorong. Untuk itulah para pendatang ini harus diorganisir dengan baik agar bisa menguntungkan masyarakat Papua yang berada di Sorong. Harus disadari bahwa wilayah Papua ini sangat luas dan para pendatang menguasai wilayah ini (Papua Barat).

PTW adalah pesaing terbuka dari tokoh sentral di Papua Barat lainnya dalam memperebutkan jabatan Gubernur Papua Barat. PTW sendiri dan kelompoknya harus kalah dalam persaingan tersebut. Sumber persaingan tersebut adalah penentuan wilayah sentral sebagai ibukota Provinsi. PTW bersikeras agar ibukota provinsi Papua Barat ditempatkan di Sorong, namun kompetitornya yang merupakan salah satu orang kuat di Tanah Papua tidak setuju dan memilih untuk menjadikan Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat. Konflik permasalahan perbedaan kepentingan untuk penentuan ibukota provinsi inilah yang menyebabkan PTW untuk sementara tersisih dalam persaingan memperebutkan Papua Barat 1.

Kalangan yang menjadi pendukung ibu kota di Manokwari sebagai ibukota provinsi Papua Barat beralasan bahwa *Mnukwar* (kampung lama). Alasannya adalah persoalan sejarah dan kota Manokwari menjadi *resident* Belanda sebelumnya. PTW berkeyakinan bahwa perebutan ibukota itulah yang menjadi dasar konflik yang berlarut dari kelompok Sorong dan Manokwari. PTW juga mengungkapkan konflik saat penentuan ibu kota itu berlangsung sengit karena keinginan keras dua kelompok untuk teguh dengan kepentingannya masing-masing.

PTW mengungkapkan terlepas dari konfliknya dengan “kubu Manokwari”, visinya adalah mengembangkan Papua Barat khususnya untuk menjadi wilayah pemerintahan sendiri-sendiri sesuai dengan kelompok-kelompok etnik yang berada di tempat tersebut. Ia mencontohkan untuk pengembangan Kabupaten Malamo yang secara khusus akan diperuntukkan untuk Suku Moi di Sorong. PTW memandang bahwa Sorong sebagai kota yang sudah berkembang akan menjadi pusat dari perkembangan peradaban di Papua Barat. Ia mempunyai mimpi bahwa Sorong nantinya akan menjadi sumber dari penghidupan untuk banyak orang asli Papua yang ada di dalamnya.

Pada masa pemerintahannya, PTW menjadikan aparat birokrasi di Sorong yang mempunyai kapasitas yang bagus dengan bekerjasama dengan universitas di Jawa. Ia mengungkapkan:

Kalau di Sorong sewaktu pemerintahan saya, orientasi sudah tidak lagi ke Unipa tetapi ke universitas-universitas di Jawa. Universitas negeri juga ada di Sorong. Jadi banyak potensi yang terdapat di Sorong yang bisa dikembangkan yaitu perikanan, pertambangan mencakup migas, batubara, emas, dan tembaga. Pendapatan migas untuk Kabupaten Sorong saja mencapai 64% untuk kabupaten dan 36 % untuk Negara. Jadi APBD kita sudah sangat cukup mencapai 112 Milyar.

Selain pertambangan, fokus yang menjadi perhatian dari PTW pada saat pemerintahannya adalah soal pendidikan. Pada saat itu yang menjadi fokusnya adalah mengembangkan sekolah-sekolah yang berpola asrama. Memang ada begitu banyak sekolah-sekolah di Sorong, namun banyak yang belum menerapkan pola asrama. Sementara di sisi lainnya, masyarakat Sorong banyak yang tinggal di daerah-daerah pedalaman dan hidup sangat miskin. Masyarakat inilah yang memerlukan pendidikan berpola asrama yang mampu untuk mengangkat masyarakat di kampung-kampung pedalaman untuk bersekolah di tempat yang berkualitas.

PTW juga beranggapan bahwa di wilayah Sorong Raya banyak terdapat sekolah-sekolah di pedalaman yang belum dikelola dengan baik. Pemerintah juga tidak serius untuk memperbaiki kualitas dari sekolah tersebut. Akhirnya yang menjadi korbannya adalah masyarakat, anak-anak muda Papua yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bagus. Permasalahan ini harus segera diselesaikan dengan menerapkan sekolah berpola asrama di Sorong Raya untuk melahirkan generasi muda yang nanti menempati posisi-posisi di birokrasi pemerintahan setelah pemekaran daerah.

Jika melihat daerah-daerah di wilayah Sorong Raya, terdapat banyak daerah-daerah yang mempunyai sekolah berpola asrama. PTW mencontohkan di daerah Teminabuan terdapat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan pola asrama. Sekolah-sekolah kejuruan yang ada juga berpola asrama. PTW mengungkapkan bahwa jiwa jika nantinya terbentuk Provinsi Papua Barat Daya adalah kesejahteraan dan pendidikan yang kuat. Pelaku-pelaku ekonomi lokal harus lebih banyak lagi ditumbuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka harus mampu menyekolahkan anaknya hingga ke luar negeri sebagai cita-cita tertinggi. Ika nanti sudah selesai sekolah akan kembali untuk membangun daerahnya masing-masing. Salah satu syarat penting lainnya bagi pegawai pemerintahan, selain mempunyai keahlian dalam bidang pemerintahan sesuai dengan keahliannya, haruslah mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris.

Kesadaran PTW tentang pendidikan ini ia wujudkan dengan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke luar negeri dengan biayanya sendiri.

“Pada saat jadi bupati (Bupati Kabupaten Sorong) banyak orang yang kasi uang. Kontraktor-kontraktor kasi saya uang langsung kirim ke anak-anak.”

Ia tidak bisa hanya mengandalkan uang dari gaji menjadi bupati untuk membiayai sekolah anaknya di luar negeri. Anaknya dulu bersekolah di luar negeri yaitu di Australia dan Inggris. Dua anaknya studi di Australia dan satu lagi di Inggris. Setiap bulan, khusus untuk dua anaknya yang di Australia ia harus meronggoh koceknya sebanyak 4000 dollar Australia. Uang yang ia dapatkan adalah hasil dari “pengabdianya” dalam bidang pemerintahan di Sorong selama hampir 11 tahun masuk ke DPRD hingga menjadi bupati.

Pada masa pensiunnya, PTW hanya bisa mengandalkan uang pensiun sebagai pegawai negeri golongan 4C yaitu sejumlah Rp.4.500.000. Namun meski demikian, tidak berarti surut niatnya untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Ia meyakini bahwa halangan-halangan dalam perjuangannya membentuk provinsi baru di kepala burung perlahan-lahan akan hilang. Meski “kalah” dalam pembentukan Provinsi Papua Barat, PTW tetap berkeyakinan bahwa suatu saat nanti Provinsi Papua Barat Daya yang ia idam-idamkan akan terbentuk.

Berbagai cara sudah PTW lakukan bersama dengan barisan tim pendukungnya. Ia pernah melakukan penggalangan kegiatan-kegiatan sosial, seni, dan olahraga untuk mendapatkan dukungan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Surat-surat dukungan disebarakan kepada lembaga-lembaga pemerintahan di kawasan Sorong dan juga masyarakat. Gerilya politik untuk pembentukan Provinsi

Papua Barat Daya ini juga dilakukan kepada Organisasi Masyarakat (Ormas) dan juga partai politik. Ia juga sudah bisa memetakan partai politik dan ormas apa saja yang mendukung dalam perjuangan pembentukan Provinsi Papua Barat daya.

Perjuangan untuk pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebenarnya sudah ia lakukan jauh sebelum meletakkan jabatan sebagai bupati pada tahun 2007. Namun perjuangan pemekaran tersebut dilanjutkan oleh penerusnya di pemerintahan. Dalam perjuangan tersebut Ia mengakui bahwa menempuh segala macam cara, termasuk dengan menggunakan uang untuk memuluskan perjuangan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. “DPR-PB yang minta-minta uang untuk bayar-bayar partai politik. Saya hanya *kasi* satu kali saja, Rp. 5 Milyar. Ini uang untuk “konsolidasi” dengan orang-orang di DPR-PB agar memperjuangkan pemekaran provinsi baru,” ujarnya. Begitu “konsolidasi” yang dilakukan kepada MRP (Majelis Rakyat Papua) agar memberikan dukungan terhadap rencana pemekaran provinsi ini.

Pada masa kepemimpinannya PTW mulai melakukan inisiatif untuk pembentukan sekretariat tim pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Sekretariat berada di Kantor Bappeda Kabupaten Sorong dan beranggotakan para PNS (Pegawai Negeri Sipil) di wilayah Sorong Raya. Setelah berakhir jabatannya, “perjuangan” pemekaran ini dilanjutkan oleh penerusnya. Gerakan “perjuangan” pembentukan Provinsi Papua Barat Daya berlangsung sangat serius pada awal-awal. PTW berkisah pernah mengkoordinir sebuah gerakan untuk membawa aspirasi pemekaran ini hingga ke Jakarta. Para bupati di wilayah Sorong Raya (Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Tambrau) berhasil dikumpulkan untuk membawa aspirasi pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini hingga sampai ke DRR-RI di Jakarta.

PTW mengingat bahwa momentum itulah yang menjadi salah satu keberhasilannya untuk menyatukan para aparatur pemerintahan—yang sebelumnya ia didik dan berikan kesempatan untuk melanjutkan studinya—untuk memperjuangkan pemekaran. Para bupati dan pejabat-pejabat setingkat Sekretaris Daerah (Sekda) dan kepala-kepala dinas di kabupaten-kabupaten pemekaran ini sebelumnya adalah anak didiknya di pemerintahan ketika mereka merintis karir di Sorong Raya. Setelah lahirnya pemekaran-pemekaran kabupaten, para birokrat yang awalnya merintis karir di Sorong kembali ke daerahnya masing-masing untuk mengisi jabatan-jabatan dari kabupaten baru tersebut.

PTW mengisahkan bahwa ia banyak mendidik birokrat-birokrat yang memang ia persiapkan untuk rencana pemekaran daerah-daerah baru di kawasan Sorong Raya. Anak-anak muda Papua tersebut ia tingkatkan kapasitasnya dengan melanjutkan pendidikan setingkat Magister bahkan Doktor. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Universitas Padjajaran, Bandung ia pilih untuk mendidik anak-anak muda birokrat di Sorong Raya. Ia masih mengingat bahwa ada dua marga berpengaruh di Sorong Raya yang ia didik dan berikan kesempatan untuk menjadi Magister dan Doktor.

Seperti pada umumnya para pejabat lokal di Papua, salah satu yang menjadi andalan dalam pembiayaan daerah-daerah pemekaran baru adalah potensi sumber daya yang sangat menggijurkan

untuk dieksplorasi. Daerah kawasan Sorong Raya misalnya sangat berpotensi sekali untuk menjalankan kabupaten baru dan membiayai masyarakatnya. PTW mengungkapkan bahwa daerah Sorong Raya sangat kaya dengan berbagai potensi. Daerah Sorong Selatan sangat potensial untuk pengembangan sagu dalam skala besar dan akan hadir investor untuk mengembangkannya. Sumber daya lainnya adalah kayu, emas, tembaga yang terdapat di Kabupaten Maybrat dan Tambrau.

PTW memiliki keyakinan dengan potensi sumber daya alam yang ada. Oleh sebab itulah Ia menjadi percaya diri memiliki angan-angan terus mengembangkan kabupaten baru dan menjadikan mereka satu kesatuan dalam Provinsi Papua Barat Daya. Tugas yang diemban untuk generasi selanjutnya adalah menemukan potensi-potensi sumber daya alam tersebut bekerjasama dengan pemerintah dan swasta (investor). Hal ini tidak bisa dihindari. Sumber daya alam tersebut adalah milik masyarakat Papua untuk membuat daerah tersebut maju dengan masyarakatnya yang sejahtera, ekonomi lokalnya tumbuh, dan kualitas sumber daya manusianya yang meningkat. Sayangnya PTW sendiri sudah terlebih dahulu menghembuskan nafas terakhirnya pada 18 Maret 2019. Ia tidak akan melihat RUU pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sedang didorong oleh DPR-RI untuk menjadi UU, sehingga mimpi berdirinya Provinsi Papua Barat Daya bisa terwujud meski banyak masyarakat Papua yang melakukan protes dan perlawanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhakidae, Daniel. 2019. “Epilog: Professor Doktor Cornelis Lay dan Jalan Ketiga Cendekiawan” dalam Pratikno *et al. Intelektual Jalan Ketiga: Pemikiran Cornelis Lay tentang Demokrasi, Desentralisasi, Nasionalisme, dan Reformasi Keamanan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Gordan, J Robert dan Mervyn J. Meggitt. 1985. *Law and Order in the New Guinea Highland: Encounters with Enga*. Hanover and London: Univerity Press of New England.
- Haenan, Paul. 1988. “Marriage alliance among the Moi of Irian Jaya (Indonesia). *Bijdragen toto de Taal-, Land- en Volkenkunde* 144 (4): 464-77.
- Klinken, Gerry van. 2015. *The making of middle Indonesia: kelas menengah di Kota Kupang, 1930-an – 1980-an*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Munro, J. 2009. *Dreams Made Small: Humiliation and Education in a Dani Modernity*. Disertasi, The Australian National University [Publikasi versi elektronik, tanpa gambar]
- Pamungkas, Cahyo. 2004. "Konflik Elit Lokal dalam Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat", *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indonesia, JilidXXX. NO. 1. 2004
- Scott, James. 2009. *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*. New Haven and London: Yale University Press.
- Suryawan, I Ngurah dan Muhammad Azkha Fahriza (editor). 2021. *Berhala-Berhala Infrastruktur: Potret dan Paradigma Pembangunan Papua di Masa Otsus*. Jakarta: ELSAM.
- Suryawan, I Ngurah. 2014. Desain Besar Penataan Daerah dan Dinamika Identitas Budaya di Provinsi Papua Barat. *Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, 23(3), 1-18.
- Timmer, Jaap. 2021. “Batas-Batas Konsep Kemajuan dalam Papua Road Map” dalam Riwanto Tirtosudarmo dan Cahyo Pamungkas (editor), *Emansipasi Papua: Tulisan Para Sahabat untuk Mengenang dan Menghormati Muridan S. Widjojo (1967-2014)*. Jakarta: Imparsial bekerjasama dengan Kampung Limasan Tonjong, Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD), Parahyangan Centre for Democracy and Peace Studies (Pacedepes) dan Yayasan TIFA.
- Timmer, Jaap. 2011. Cloths of Civilisation: Kain Timur in the Bird’s Head of West Papua. *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 12 (4): 383-401.
- Wiessner, Polly dan Aki Tumu. 1998. *Historical Vines: Enga Network of Echange, Ritual, and Warfare in Papua New Guinea*. Smithsonian Series in Etnographic Inquiry. Washington: Smithsonian Institution Press.